

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, syukriy. (2012). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris Atas Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik. *SSRN Electronic Journal*, August 2008. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1709142>
- Abdullah, S. da. A., & J.A. (2006). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi*, 9, 23–. <https://doi.org/10.2139 / ssrn.1709142>
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Media Citra Mandiri Press.
- Andang, B. (2019). Interaksi Elit Dalam Formulasi Kebijakan Anggaran. In *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)* (pp. 1-6).
- Anderson, J. E. (2003). *Public Policymaking*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Anderson, J. E. (2014). *Public policymaking*. Cengage Learning.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik* (1st ed.). Cv. Pustaka Setia.
- Bachrul, E. (2002). *Keuangan Pemerintah Otonom di Indonesia*.
- Easton, D. (1957). An approach to the analysis of political systems. *World politics*, 9(3), 383-400.
- Easton D. (1965). *A System Analysis of Political Life*. New York: Wiley.
- Edwards, G. C., Edwards, V. P. M., & Sharkansky, I. (1978). *The policy predicament: Making and implementing public policy*. San Francisco: WH Freeman.
- Elder, C. D., & Cobb, R. W. (1984). Agenda-building and the politics of aging. *Policy Studies Journal*. 13(1), 115.
- Carl, J. F. (1963). Man and His government. *New York*, 163.
- Dahl, R.A. (1961). *Who Govern? Democracy and Power in an America City*. New Heaven, CT: Yale University Press.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). The new public service: An approach to reform. *International Review of Public Administration*, 8(1), 3-10.
- Dunn, W. N. (2001). *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Hanindita Graha Widya.

- Djohan, D. (2005). Fenomena etnosentrisme dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, 209-26.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy*. Pearson.
- Goodnow, Frank J.(1900). *Politic and Administration*. New York: The Mac Millan Co.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2013). *Hubungan dan Masalah Keagenan Di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. 53(9), 1689–1699. researchgate.net
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik Evaluasi Reformasi Formulasi*. Intrans Publishing.
- HR, R. (2014). *Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 17. J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Reneka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 1. 1945*.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis* (2nd ed.). Gava Media.
- Islamy, M. I. (2000). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (VIII). Bumi Aksara.
- Ismail, S. M. (2016). *KONSEP DAN KAJIAN TEORI PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK*. 06, 195–224.
- Jenkins, W. I. (1978). *Policy analysis: A political and organisational perspective*. Wiley-Blackwell.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *THEORY OF THE FIRM : MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305–360*.
- Kadir, A. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. Cv. Dharma Persada Dharmasraya.
- Keban, Y. T. (2004). *Enam dimensi strategis administrasi publik: konsep, teori dan isu*. Gava Media.
- Kooiman, J (1993b). 'Findings, Speculations and Recommendations', in J. Kooiman (ed.) *Modern Governance*. London, Sage.brink
- Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (1950). *Power and society: A Framework for Political Inquiry*. New Haven: Yale University Press.
- Latifah, N. (2010). Adakah Perilaku Oportunistik Dalam Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik? *Fokus Ekonomi*, 5(2), 85Latifah, N. (2010).

Adakah Perilaku Oportunistik.

- Lester, J. P. Dan Joseph Stewart. 2000. *Public policy: an evolutionary approach*.
- Levine, S., & White, P. E. (1961). Exchange as a conceptual framework for the study of interorganizational relationships. *Administrative science quarterly*, 583-601.
- Lindblom, C. (1986). *Proses Penetapan Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Jakarta: Airlangga.
- Madani, M. (2010). *Interaksi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran Di Kota Makassar*. Disertasi Universitas Negeri Makassar.
- Manan, B. (1999). *Lembaga Kepresidenan*. Gama Media:Yogyakarta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Dkk. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook. (3rd ed)*. California: SAGE Publication.
- Norsain. (2019). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan Apbd (Studi Kasus Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2007-2010). In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9, pp. 1689–1699). <https://www.google.com/search?q=issn%1098-6596>
- Nugroho, H. A. R. T. dan R. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Nurcholis, H. (2009). *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Grasindo.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: HowThe Entrepreneur Spirit is Transforming*
- Parsons, W. (2006). *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana Prenadamedia Group.
- Perkasa, A. A., Yunus, R., & Rusli, A. M. (2013). Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 6(1), 21-32.
- Purwanto, E. A. (2005). *Pelayanan Publik Partisipatif*. Yogyakarta: Gajah Mada UniversityPress.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: governing without government. *Political studies*, 44(4), 652-667.
- Rhodes, R. A. (2000). Governance and public administration. *Debating governance*, 54, 90.
- Reskinof, A. (2003). *Fungsi dan peran legislatif dalam penyelenggaraan*

otonomi daerah:: Studi kasus hubungan antara DPRD dan pihak eksekutif dalam pembuatan Perda dan RAPBD Kabupaten Kapuas (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

- Sarundajang, S. H. (2005). Arus balik kekuasaan pusat ke daerah.
- Salusu, J. (2004). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprovit*. Grasindo.
- Santoso. (1998). *Analisis Kebijakan Publik*. PT. Tiara Wacana.
- Saragih, B. R. (n.d.). *Himpunan Undang-Undang Dasar Undang-undang dan Beberapa Aturan Lainnya Tentang Pemerintah Daerah Indonesia*.
- Subarsono, A. (2013). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Teori (V)*. Pustaka Pelajar.
- Suratman, H. (2017). *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Capiya Publishing.
- Stoker, G. (1998). Governance as theory: five propositions. *International social science journal*, 50(155), 17-28.
- Stone, C. N. (1980). Systemic power in community decision making: A restatement of stratification theory. *American Political Science Review*, 74(4), 978-990.
- Syhabudi. (2012). *Komunikasi Politik Antara Eksekutif dan Legislatif dalam Penyusunan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir*.
- Taylor, F.W. (1911). *The Principles of Scientific Management*. New York: Harper Brothers
- Udoji, C. J. (1981). The African Public Servant as a Public Policy in Africa. *Addis Abeba: African Association for Public Administration and Management*.
- Utomo, W. (2006). *Administrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Pradigmadari Adnistrasi Negara ke Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wilson, W. (1887). The study of administration. *Political science quarterly*, 2(2), 197-222.
- Wance, M. (2021). Pola Relasi Eksekutif Dan Legislatif Pada Penyusunan Legislasi Daerah (Studi Di Pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan 2015). *JIP UNIMUDA: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 42-66.
- Weber, M. (2003). *The history of commercial partnerships in the Middle Ages*. Rowman & Littlefield.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. CAPS.

Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Irfan Ali, S.IP, M.Si
Tempat/ Tgl Lahir : Pare-Pare, 09 April 1986
Alamat : Jl. Adhyaksa Baru, Lr. 3. No. 9 Makassar
Agama : Islam
Status : Menikah
Email : Irfan.ali8677@gmail.com
Telepon / HP : 081355355855

Pendidikan Formal

2019 – sekarang : (Kandidat Doktor) S3 Program Administrasi Publik
Universitas Hasanuddin Makassar
2013 - 2015 : S2 Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah,
Universitas Hasanuddin Makassar
2004 – 2009 : S1 Program Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar
2001 – 2004 : SMA Negeri 1 Pare-Pare

1998 – 2001 : SMP Negeri 2 Pare-Pare

1992 – 1998 : SD Negeri 5 Pare-Pare

Pengalaman/Kegiatan Organisasi

- Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Makassar 2021 - saat ini
- Wakil Ketua Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah DPD KNPI Sulawesi-Selatan 2019 - saat ini
- Ketua Biro Kerjasama Ormas, Hubungan Legislatif-Eksekutif DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan 2019
- Wakil Sekretaris Bidang Organisasi dan Daerah DPD Partai Golkar Kota Makassar 2016 - 2019
- Wakil Ketua DPD AMPI Sulawesi Selatan 2017 - 2022
- Wakil Sekretaris DPD AMPG Sulawesi Selatan 2017 - 2019
- Wakil Bendahara DPD KNPI Sulawesi Selatan 2013 - 2016
- Wakil Sekretaris DPD AMPI Sulawesi Selatan 2012 - 2017
- Ketua 1 Himpunan Mahasiswa Politik FISIP UNHAS 2006 – 2007
- Ketua Self Introduction Program Mahasiswa Politik Fisip Unhas 2005
- Ketua Ekstrakurikuler UKM Basket Fisip Unhas 2005 - 2007

Pengalaman Kerja

2011 - Sekarang : Direktur Utama Cv. Putra Mahkota. Pengadaan Barang dan Jasa

2010 - 2011 : Reporter/Presenter Celebes Tv

2009 - 2010 : Reporter/Presenter Sun Tv Makassar (MNC GROUP)

2007 - 2009 : Project Officer dan Marketing Fajar International Promotion (FAJAR GROUP)